

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Al-Ghazali, tampaknya lebih condong kepada pemerintahan monarki. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa seseorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat *tafwidh* dari pemegang kekuasaan dan inilah yang berlaku saat itu.

Dari berbagai bentuk pemerintahan yang ada, bagi Rabi', bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk *monarki*. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan *aristokrasi*. Suatu pemerintahan yang berada di bawah pimpinan sekelompok orang terpilih; bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk pemerintahan *oligarki*. Model pemerintahan ini kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat. Dan ia juga tidak dapat membenarkan pemerintahan *demokrasi* yang diperintah oleh rakyat.

2. Alur pemikiran Al-Ghazali menurut Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu'thi Muhammad, mengandung arti bahwa kekuasaan kepala negara itu *muqaddas* (suci). Karenanya rakyat wajib mentaati segala perintahnya. Meskipun seseorang menjadi sultan atau kepala negara atas kehendak Allah, namun menurut Al-Ghazali, ia juga harus mendapat *tafwidh* (penyerahan kekuasaan) dan *tauliyat* (pengangkatan dari orang lain).

Alasan utama mengapa Ibnu Abi Rabi' memilih bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan dan mengapa tidak yang lainnya, adalah keyakinannya dengan banyak pemimpin, politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan.

Pemimpin monarkilah yang mempunyai kekuasaan absolut, sedangkan yang lainnya hanyalah sebagai pelaksana titahnya. Ibnu Abi Rabi' berkata, "Semua orang yang di angkat dalam jabatan politik cukup mendengarkan, menaati, dan melaksanakan perintah raja. Mereka bagaikan anggota tubuh raja yang dapat digunakan sekehendaknya.

B. SARAN

1. Dalam setiap bentuk pemerintahan di dunia ini pasti ada kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Tidak terkecuali bentuk pemerintahan monarki, misalnya rakyat tidak punya kuasa apa-apa, rakyat tidak punya kekuasaan berendapat, kemakmuran rakyat bergantung pada kebaikan raja, raja bisa bertindak sesuka hati dan hak asasi rakyat terbelenggu. Jadi menurut penulis

selain raja mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyatnya, dia juga harus mempunyai suatu lembaga yang mendengar aspirasi rakyatnya secara langsung, walaupun keputusannya tetap hak penuh raja.

2. Kalau penulis perhatikan pendapat dari Ibnu Abi Rabi' mengapa memilih bentuk monarki itu salah satunya adalah rasa puasnya terhadap Bani Abbasiyah yang berhasil memimpin pada waktu itu dalam bentuk monarki. Jadi kalau menurut penulis yang paling urgen itu adalah siapa orang yang memimpin dalam suatu pemerintahan itu. Jika diterapkan bentuk monarki atau yang lainnya tetapi orang-orang yang memimpinya bukanlah orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat menjadi pemimpin maka itu juga percuma dan mengancam suatu negara tersebut.